

## STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021-2022

Nisa Azizah<sup>1</sup>, Nandang Alamsah Deliarnoor<sup>2</sup>, Novie Indrawati Sagita<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Jl. Bukit Dago Utara no.25, Kota Bandung, 40135  
E-mail: nisaazizah@gmail.com; nandangalamsah@gmail.com; novindsa@gmail.com

**ABSTRAK.** Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran masih belum efektif. Hal tersebut di tunjukan melalui penataan wisata yang dilakukan lebih khususnya destinasi paling favorit wisatawan seperti Pantai Pangandaran, Pantai Barat dan Pantai Timur. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui library dan studi lapangan yang mencakup wawancara, observasi dan dokumentasi dengan para informan baik dari internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, pihak pengelola tempat wisata, pengunjung tempat wisata, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022 masih belum efektif jika dianalisis menggunakan tiga dimensi strategi yang dikemukakan oleh David yaitu meliputi, perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi; (1) Ketidaktahuan internal terkait proses perumusan strategi yang dilakukan serta strategi yang disepakati internal yang diadopsi untuk diterapkan menunjukkan bahwa dimensi perumusan strategi belum terlaksana dalam proses pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, (2) Dari dimensi penerapan strategi munjukan bahwa proses yang dilakukan oleh dinas belum terarah dengan baik, serta minimnya kesiapan dari pelaksana sehingga berdampak pada kurangnya dukungan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata di Kabuapten Pangandaran, (3) Belum dilakukannya perbaikan terhadap beberapa objek pariwisata menjadi bukti bahwa proses penilaian dan evaluasi merupakan dimensi yang belum dipenuhi dalam rangka pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2022.

**Kata kunci;** Strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolaan Wisata.

## *STRATEGY OF TOURISM AND CULTURE DEPARTMENT IN TOURISM MANAGEMENT IN PANGANDARAN REGENCY 2021-2022*

**ABSTRACT.** Problems in the field show that the strategy for developing and structuring tourism areas carried out by the Regional Government of Pangandaran Regency is still not effective. This is demonstrated through the tourism arrangements carried out, especially the most favorite tourist destinations such as Pangandaran Beach, West Coast and East Coast. This research uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques through libraries and field studies which include interviews, observation and documentation with informants from both the internal Department of Tourism and Culture, tourist attraction managers, visitors to tourist attractions, the community and the public. in Pangandaran Regency. The results of this research indicate that the strategy of the Department of Tourism and Culture in managing tourism in Pangandaran Regency in 2021-2022 is still not effective if analyzed using the three dimensions of strategy proposed by David, namely, strategy preparation, strategy implementation and strategy assessment; (1) Internal ignorance regarding the strategy formulation process carried out as well as the internally agreed strategy adopted for implementation shows that the strategy formulation dimension has not been implemented in the tourism management process in Pangandaran Regency, (2) From the strategy implementation dimension it shows that the process carried out by the department has not been implemented. well-directed, as well as the lack of readiness of the implementers, which has an impact on the lack of community support in managing tourism in Pangandaran Regency, (3) There have been no improvements to several tourism objects, which is proof that the assessment and evaluation process is a dimension that has not been fulfilled in the framework of tourism management in the Regency. Pangandaran during 2021-2022.

**Key words;** Strategy, Department of Tourism and Culture, Tourism Management.

## PENDAHULUAN

Wisata merupakan kebutuhan tersier. Seseorang akan melakukan wisata apabila semua kebutuhan pokok dan sekunder telah terpenuhi. Setelah berjalannya pandemi covid-19 selama kurang lebih dua tahun yaitu pada awal tahun 2020 hingga akhir 2021 menyisakan banyak trauma yang mendalam bagi kehidupan manusia. Terutama pada keluarga yang ditinggal kerabatnya meninggal akibat covid-19 (Oktafiantika et al., 2022). Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata, baik wisata secara lokal, regional, atau ruang lingkup nasional pada suatu negara sangat erat kaitannya dengan pembangunan daerah atau negara tersebut, dengan kata lain pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Pembangunan di bidang kepariwisataan merupakan salah satu terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan negara (Kristian, 2021).

Kegiatan wisata merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup totalitas produksi (oleh penyedia) maupun konsumsi (oleh pengguna) barang dan jasa dengan maksud utama untuk rekreasi (Zhu et al., 2023). Konsep pariwisata tidak hanya berkaitan dengan keindahan panorama alam dan jelajah situs bersejarah, melainkan telah berkembang dengan melibatkan masyarakat dalam penataan pariwisata, melalui konsep wisata berbasis masyarakat. Berbagai produk pariwisata tersebut yang kemudian akan dinikmati oleh para konsumen dengan membelanjakan sejumlah uang (Laksono et al., 2020).

Dalam era globalisasi, dewasa ini sektor pariwisata menjadi industri yang berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi pariwisata yang dapat menarik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Potensi yang ada pada pariwisata di

Indonesia tentu saja tidak di sia-siakan oleh Pemerintah. (Muamar et al., 2018).

Menurut World Tourism Organization (WTO), mengatakan( bahwa sektor pariwisata global akan menjadi industri terbesar di dunia, hal ini dapat dilihat dari data yg dimiliki oleh WTO tahun 1995- 2002 yang menyebutkan( bahwa pertumbuhan wisatawan global sebesar 3,57 % setiap tahunnya (Yachya et al., 2016). Penciptaan bentuk pengelolaan pariwisata bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah dan memperkenalkan daya tanggap tempat wisata dan objek wisata di Indonesia, termasuk kota dan daerah (Silviana & Mubarak, 2020).

Pariwisata Berkelanjutan atau Sustainable Tourism merupakan pariwisata yang berkembang sangat pesat, dikarenakan konsep pariwisata ini berprospek terhadap jangka panjang dan berkelanjutan (Husein, 2023). Melalui konsep ini, sektor investasi pun dalam sektor pariwisata tercatat cukup besar senilai 401,4 juta dollar AS (Kompas, 2020). Hal tersebut merupakan suatu hal yang baik dan dapat dijadikan sebagai saranan untuk pengembangan pada sektor pariwisata Indonesia menjadi lebih baik lagi (Rahmanul, 2021). Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Republik Indonesia terus bekerja keras untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata di Indonesia. Dalam pengembangannya, salah satu yang menjadi daya tarik wisatawan adalah dengan memperhatikan fasilitas wisata, fasilitas umum, aksesibilitas/sarana prasarana (Nasution et al., 2022).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Februari 2020 mengalami kontraksi hingga 30,42% dibandingkan Januari 2020, dan turun 28,85% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tetapi untuk itu Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mempersiapkan sejumlah langkah-langkah mitigasi dalam menangani krisis pariwisata di Indonesia (Hardianto et al., 2021).

Kabupaten Pangandaran merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi Pariwisata yang besar. Pangandaran memiliki dasar hukum berdiri yang tertulis di dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2012, yang mana di dalam pasalnya dibahas tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola wilayahnya. Undang-Undang ini mengacu pada Undang-undang Otonomi Daerah, sehingga Pangandaran memiliki otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Pangandaran memiliki lima (5) destinasi Pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Budaya yang disingkat menjadi Disparbud di Pangandaran. Kelima destinasi tersebut meliputi; (1) Pantai Pangandaran, (2) Pantai Karapyak, (3) Batu Hiu, (4) Batu Karas, dan (5) Green Canyon Kabupaten Pangandaran difokuskan untuk melakukan pembangunan Pariwisata dan budaya bahari dikarenakan memiliki potensi wisata yang besar pada wilayah tersebut dengan landasan hukum Pasal 25 Perda Prov.Jabar No.15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat yang memiliki tema pengembangan pariwisata bahari dan alam bahari di Priangan (Wakila et al., 2022).

Dinas Pariwisata dan Budaya dalam Upaya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Pangandaran kemudian merancang Rencana pada tahun 2016-2021 berdasarkan pada RPJMD yang menekankan pada pengembangan Pariwisata. Rencana Strategis yang disingkat menjadi Renstra hasil rancangan dari Dinas Pariwisata dan Budaya yang disingkat menjadi Disparbud Kabupaten Pangandaran mencoba untuk merealisasikan visi tersebut dengan membuat program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi Pariwisata. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 merupakan tahapan penyusunan program oleh Disparbud yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 tentang visi mengenai konsep pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut “Kabupaten Pangandaran Sebagai

Tujuan Wisata Berkelas Dunia” tujuan dari pengembangan destinasi Pariwisata yang sesuai dengan visi adalah sebagai berikut: 1) Pembangunan Destinasi Pariwisata; 2) Pembangunan Industri Kepariwisata; 3) Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata; 4) Pembangunan Kelembagaan Pariwisata.

Pelaksanaan strategi menurut Wheelen dan Hunger dalam Suharni, adalah proses mewujudkan strategi yang telah diformulasikan ke dalam aksi melalui tiga indikator, yaitu program, anggaran serta prosedur. Untuk mengidentifikasi sebuah organisasi dalam mengimplementasikan strateginya, dapat melalui tiga indikator tersebut (Safi'i & Satlita, 2016).

Permasalahan di lapangan menunjukkan bahwa strategi pengembangan dan penataan kawasan pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran masih belum efektif. Hal tersebut di tunjukan melalui penataan wisata yang dilakukan lebih khususnya destinasi paling favorit wisatawan seperti Pantai Pangandaran, Pantai Timur dan Pantai Barat. Yang mana para pedagang kaki lima yang kini ada di zona inti telah dipindahkan ke bagian belakang, namun karena pemindahan pedagang tidak mengikuti jalur lintas wisatawan, maka interaksi para pedagang dengan wisatawan sulit terjadi, lama kelamaan pedagang kembali masuk ke zona inti. Akhirnya, relokasi pedagang kaki lima dan tempat parkir yang sebelumnya telah menghabiskan jutaan rupiah dalam rangka pengelolaan pariwisata disia-siakan begitu saja dan menjadi tidak terawat.

Di sisi lain, belum efektifnya strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dapat di lihat dari kurangnya perhatian terhadap pengelolaan sampah di Kawasan wisata terutama saat musim libur. Dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap minggu membuat jumlah sampah berserakan di hampir seluruh lokasi wisata juga terus meningkat. Selain karena kurangnya kesadaran dari para wisatawan mengenai pentingnya kebersihan pantai juga karena

kurangnya fasilitas yang disediakan dalam hal ini ketersediaan tempat sampah di sekitar lokasi wisata.

Sejauh ini konsentrasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih pada pengembangan objek wisata, sedangkan pengembangan sarana-prasarananya masih 0%. Padahal jika dirasionalkan bahwa pengembangan objek wisata tanpa disertai dengan pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur jalan maka akan sangat sulit bagi wisatawan untuk mengakses tempat wisata tersebut atau sekedar mengetahui. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penelitian ini memberikan konsen terhadap strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022.

## METODE

Guna mengkaji terkait strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran, maka dibutuhkan penelitian dan analisis yang mendalam agar dapat diperoleh data yang lebih faktual, aktual serta kontekstual mengenai hal tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun alasan penggunaan metode ini yakni permasalahan yang diangkat yakni strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022 akan lebih tepat melalui deskriptif berdasarkan hasil temuan di lapangan. Teori strategi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada tiga dimensi strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh David (2011: 6) yang antara lain meliputi perumusan strategi, penerapan strategi dan penilaian strategi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi beberapa tahapan yang antara lain meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi (Malindir et al., 2022). Data utama dalam kajian ini bersumber dari *stakeholder* terkait, yakni

pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, tokoh masyarakat, wisatawan dan masyarakat yang berada disekitaran area wisata. Di sisi lain penulis juga menggunakan studi pustaka sebagai sumber rujukan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perumusan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran

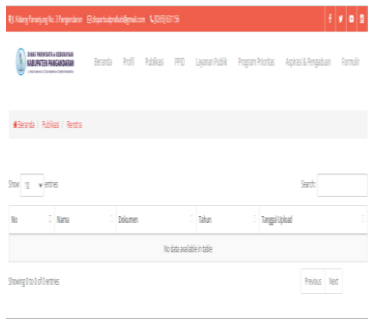
Setiap daerah memiliki potensinya masing-masing, salah satunya berkaitan dengan pariwisata sebagai salah satu sektor yang menjamin pemasukan bagi Pemerintah Daerah. Kabupaten Pangandaran sendiri sejak lama sudah dikenal dikanca lokal maupun mancanegara dengan potensi pariwisata yang dimiliki (Subarkah, 2018). Pada bagian ini akan dibahas secara spesifik terkait dengan strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan pendekatan teori Dimensi strategi yang dikemukakan oleh David (2011:6) yang mana terdiri dari tiga dimensi yang meliputi; Perumusan Strategi, Penerapan Strategi dan Penilaian Strategi.

Dalam proses pengelolaan pariwisata disuatu daerah maka dibutuhkan adanya perumusan strategi yang dilakukan. Perumusan menjadi tahap awal sehingga setiap pelaksana perlu untuk merumuskan dengan baik serta memiliki landasan yang kuat (Naonan, 2023). Proses perumusan pada hakekatnya menjadi

bertanggungjawab dari pelaksana sehingga proses dan keterlibatan pihak eksternal disesuaikan dengan kebutuhan dari strategi yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran penuh dalam proses perumusan strategi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa proses perumusan strategi yang dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka pengelolaan pariwisata dilakukan dengan terlebih dahulu mengkaji aturan terkait mulai dari Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2018 sampai dengan rencana induk kepariwisataan yang sudah disusun sejak tahun 2015.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bukan hanya pelaksana, melainkan masyarakat juga tidak mengetahui strategi apa yang dipilih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Hal ini dikarenakan proses sosialisasi yang kurang serta akses informasi di situs resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pangandaran yang tidak dapat diakses seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: <https://disparbud.pangandarankab.go.id/>

**Gambar 1. Tampilan Renstra di Situs Resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran**

Dari gambar diatas maka dapat dianalisa bahwa proses sosialisasi mengenai rencana strategi maupun strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola wisata di Kabupaten Pangandaran

bahkan tidak tersedia pada situs resmi dinas. Hal ini semakin menguatkan bahwa perencanaan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak berjalan dengan baik sehingga tidak diakses kepada public.

Proses perumusan strategi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya berdampak pada menurunnya daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2022. Berdasarkan data yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa Pantai Pangandaran mengalami penurunan drastis pada jumlah pengunjung di tiga destinasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut juga memberikan dampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) wisata dari Pantai Pangandaran. Adapun penurunan daya tarik wisata selama tahun 2021-2022 pada tiga destinasi wisata (Pantai) di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 1. Daya Tarik Wisatawan di Tiga Objek Wisata Favorit di Pangandaran**

Daya Tarik	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022
Pantai Pangandaran	13.326.055.000	10.185.207.500
Pantai Barat	11.209.115.000	8.976.432.000
Pantai Timur	10.617.902.000	8.109.907.000

Sumber: <https://disparbud.pangandarankab.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dianalisis bahwa adanya penurunan daya tarik wisatawan pada tiga objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pangandaran. Hasil ini juga menunjukkan bahwa dalam proses salah satunya perumusan strategi yang dilakukan dapat dikatakan bahwa belum maksimal sehingga perlu dirumuskan Kembali.

Proses perumusan merupakan langkah awal yang seharusnya dilakukan dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran. Sehingga dengan begitu maka

pengelolaan pariwisata akan berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kabupaten Pangandaran. Hanya saja hasil penelitian di lapangan menunjukkan kondisi yang tidak sesuai yaitu proses perumusan yang tidak berjalan dengan baik sehingga tidak diketahui oleh internal dinas secara umum dan tidak dapat diakses kepada Masyarakat secara luas melalui situs resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

Mengacu pada teori dimensi strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh David (2011:6) maka dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022 belum memenuhi indikator pertama yakni perumusan strategi. Hal ini didasarkan pada ketidaktahuan internal terkait dengan proses perumusan strategi yang dilakukan serta tidak adanya informasi yang disampaikan kepada publik baik melalui sosialisasi langsung maupun publikasi pada media resmi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

## 2. Penerapan Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran

Setelah proses perumusan sudah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, maka tahapan selanjutnya yakni penerapan dari strategi itu sendiri. Pada tahapan pelaksanaan ini akan diuji sejauh mana keefektifan dari strategi yang telah disusun sebelumnya sehingga apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai. Tahapan pelaksanaan ini juga menjadi ajang untuk menguji kapasitas dari pada pelaksana.

Berkaitan dengan penelitian ini maka pada tahapan pelaksanaan ini dimaksudkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menerapkan strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Pada tahapan pelaksanaan ini menjadi pembuktian apakah strategi yang telah dibuat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mampu untuk menjawab tantangan dan meningkatkan

pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran atau sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan sumber daya manusia (SDM) pelaksana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran maka dilakukan proses wawancara langsung dengan berbagai informan baik dari internal dinas, pengelola tempat wisata maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa dalam proses pelaksanaan strategi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) pelaksana yang mumpuni dari segi jumlah. Sehingga berdampak pada pengelolaan pariwisata yang dianggap masih jauh dari optimal. Perbandingan minimnya jumlah SDM pelaksana dengan jumlah masyarakat dan pelaku usaha ditempat wisata salah satunya Pantai Pangandara sebagai objek utama pariwisata dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 2. Perbandingan Antar Jumlah SDM Dengan Warga, Pelaku Usaha, dan Masyarakat Yang Ada di Tempat Wisata**

No	Pihak Yang Berada di Pantai Pangandaran	Jumlah
1	Disparbud Pangandaran	1
2	Warga Pantai Pangandaran	2
3	Pelaku wisata (Penyedia Jasa Penginapan, penyewaan ATV Trail)	3
4	Pedagang dan pelaku Ekonomi Kreatif	2202 Personel
5	Pegawai Hotel	1000 Personel

*Sumber: Lakip Kabupaten Pangandaran Tahun 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa adanya jumlah yang tidak seimbang antar pelaksana dengan jumlah masyarakat disekitaran dan pelaku usaha disekitaran Pantai pangandaran sebagai objek utama pariwisata di Kabupaten Pangandaran. Jumlah SDM yang minim akan

berdampak pada tidak terkontrolnya berbagai hal yang tidak diinginkan serta berdampak buruk terhadap aplikasi dari strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Di sisi lain, temuan di lapangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak Sumber daya manusia merupakan perangkat utama dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran sehingga sangat menentukan keberhasilan dari strategi maupun program yang diterapkan. Oleh karena itu maka temuan di lapangan mengenai sangat minimnya jumlah SDM pelaksan yang ditempatkan di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata belum benar-benar serius untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabuapten Pangandaran.

Mengacu pada teori dimensi strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh David (2011:6) maka dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022 belum memenuhi indikator kedua yakni penerapan strategi. Hal ini dibuktikan dengan proses pelaksanaan yang tidak tearah yang dilakukan oleh dinas, kurangnya kesiapan pelaksana sehingga berdampak pada kurangnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan strategi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran.

### 3. Penilaian Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pangandaran

Setelah proses perumusan dan penerapan dari strategi yang dibuat maka selanjutnya adalah tahapan akhir yakni penilaian strategi. Pada tahapan penilaian strategi ini yang nantinya akan menentukan apakah strategi yang sudah diterapkan berjalan efektif, perlu dilakukan pembaharuan/perubahan ataukah perlu untuk diganti dengan strategi lainnya. Oleh karena itu maka tahapan penilaian strategi ini sangat penting

untuk dilakukan sehingga upaya untuk mencapai tujuan melalui strategi yang dibuat dapat terwujud.

Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan maka penilaian strategi dimaksudkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan perlu untuk melakukan penilaian berdasarkan berbagai pertimbangan dan masukan untuk kemudian menentukan langkah selanjutnya untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Pangandaran. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana pengelolaan tempat wisata yang dilakukan oleh Dinas Parwisata dan Kebudayaan Kabuapten Pangandaran adalah dengan membandingkan antara targer yang diinginkan di capai yang sudah ditetapkan di awal dengan realisasinya melalui program pengembangan pariwisata.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa adanya anggaran (PAD) yang tidak sesuai antara target awal dengan reasisasi program pengembangan pariwisata yang diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 3. Program Pengembangan Pariwisata, Target dan Realisasi Tahun 2022**

Program	Indikator Program	Target Program	Realisasi Program
Pengembangan Pariwisata	Jumlah PAD dari sektor Pariwisata	Rp. 11.000.000 (11 Miliar)	Rp.13.782 . 568. 250 (13,7 Miliar)
	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan	5 Lokasi wisata	5 Lokasi wisata

*Sumber: Lakup Kabupaten Pangandaran Tahun 2022*

Tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa antar perencanaan yang sudah ditetapkan di awal dengan pelaksanaan tidak berjalan sebanding, sehingga ini tentu ada berpengaruh terhadap pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandara

yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berkaitan dengan adanya *gap* yang cukup besar antar target awal dengan realisasinya ini juga menunjukkan kelemahan dari Lembaga pelaksana (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan) dalam merumuskan program.

Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menganggap bahwa strategi yang diterapkan sudah efektif, yang mana tolak ukur yang digunakan yakni lama tinggalnya wisatawan atau indikator GST yang mana pada dasarnya indikator ini terlalu lemah untuk digunakan dalam menilai efektivitas dari strategi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandara. Kondisi ini tentunya semakin menguatkan bahwa penerapan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran belum optimal.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dianalisa bahwa selain dari proses awal perumusan strategi tidak sesuai dengan penerapannya, penilaian masyarakat terkait dengan strategi yang digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga oleh masyarakat dinilai masih sangat lemah dan kurang efektif dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran. Tentunya sangat disayangkan bahwa potensi alam pendukung pariwisata yang dimiliki sangat bagus hanya belum mampu untuk dimaksimalkan.

Mengacu pada teori dimensi strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh David (2011:6) maka dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022 belum memenuhi indikator ketiga yakni penilaian strategi. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakselarasan pemahaman para pelaksana, kurang tegasnya pelaksana sehingga tidak

sepenuhnya didukung oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Di sisi lain, potensi alam dan garis pantai yang panjang oleh sebagian besar masyarakat dan pengelola tempat wisata dianggap belum mampu dioptimalkan sebagai daya tarik bagi para wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu maka diperlukan langkah-langkah perbaikan dimulai dengan evaluasi untuk mengetahui apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari strategi yang diterapkan sehingga ke depannya pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran akan lebih baik.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya serta mengacu dari teori dimensi strategi sebagaimana yang dikemukakan oleh David (2011:6) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2022 masih belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi berikut; (1) Proses perumusan strategi yang tidak dilakukan sehingga baik internal pelaksana maupun masyarakat yang tidak mengetahui. Hal ini juga diperkuat dengan tidak terbukanya dinas dalam mensosialisasikan strategi yang dirumuskan dan ditetapkan melalui situs resmi yang dimiliki. Proses perumusan strategi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya berdampak pada menurunnya daya tarik wisata di Kabupaten Pangandaran selama tahun 2021-2022. (2) Penerapan strategi tidak berjalan maksimal, salah permasalahannya terletak pada jumlah yang tidak seimbang antar SDM pelaksana (1 orang) dengan jumlah masyarakat dan pelaku usaha disekitaran tempat wisata. (3). Penilaian strategi yang dapat diukur dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan sebelumnya dan realisasi. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa ada *gap* antara target anggaran untuk pengelolaan 5 destinasi pariwisata yaitu Rp, 11.000.000.000 dengan



realisasi program yang mencapai Rp.13.782. 568. 250.

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka setidaknya terdapat tiga point utama yang penulis usulkan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang meliputi; (1) Perlu dilakukan evaluasi dan kajian Kembali terkait dengan rencana program yang akan digunakan dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran. (2) Sumber daya manusia pelaksana perlu ditingkatkan secara jumlah, dengan begitu maka dapat mengimbangi jumlah pelaksana usaha dan jumlah para wisatawan yang datang sehingga dapat memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan berjalan sesuai yang diinginkan. (3) Evaluasi perlu dilakukan secara rutin terkait realisasi strategi atau program sehingga dapat memastikan adanya perbaikan (jika diperlukan) dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Guzman, A., B., D, Labrador, S., E, and Rodil, F., Anne. (2019). Understanding Filipino tourists' future time perspective and emotional experiences during delayed international flights through design triangulation. *International Journal of Tourism Sciences*, 19(4). <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15980634.2019.1706127?src=>
- Hardianto, W. T., Emelia, & W, R. M. C. (2021). Strategi Pengelolaan Pariwisata di Masa Covid-19. *Jurnal manajemen*, 5(1), 38–52.
- Husein, Jamal. (2023). Tourism in ASEAN-5: A novel panel unit-root test for shocks persistence with gradual structural breaks and common factors. *International Journal of Tourism Research*. 23 (5).
- Kristian, Y. (2021). Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat di Danau Aco Kampung Linggang Melapeh Kecamatan Linggang Bigung. *eJournal Administrasi Negara*, 5(1), 5404–5417. [https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL\(02-13-17-04-46-32\).pdf](https://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/02/JURNAL(02-13-17-04-46-32).pdf)
- Laksono, N. F., Chawa, A. F., & Yuliati, Y. (2020). Pengelolaan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Sawentar). *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 5(4), 865. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i4.539>
- Lukman Santoso, Y. T. C. dan S. (n.d.). Dilema Wisata Halal di Pulau Lombok. 2020, 15(1), 23–44.
- Malindir, G., O, Kartini, D., Sri, & Mulyawan, R. (2022). Khazanah Sosial, 4(3). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ks/article/view/17482>
- Muamar, A., Faozi, M. M., & Fitriati, A. (2018). Pengelolaan Kawasan Wisata Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 117. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2942>
- Naonon, Lisa. (2023). The Role of Culture as a Determinant: Evidence From European Cities. *International Journal of Tourism Cities*, 9(1). <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJTC-07-2021-0154/full/html>
- Nasution, N. H., Batubara, M., & Arif, M. (2022). Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Mandailing Natal Perspektif Ekonomi Islam Dengan Pendekatan QSPM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 423. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4507>
- Paladini, Stefania, and Saha, Crishnendu. (2023). The quest for sustainability in lower orbit: Conceptual models for space tourism. *International Journal of Tourism Research*. 23 (3).
- Oktafiantika, W., Triono, B., & DJ, E. W. (2022). Strategi Dinas Pariwisata dalam

- Mempromosikan Wisata Daerah pada Masa Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(2), 132–142. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2669>
- Pratiwi, S. (2020). Strategi Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Pantai Trikora di Kabupaten Bintan Siska. (December), 1–6.
- Rahmanul, M. (2021). *PUBLIKA : Pengelolaan Pariwisata Danau Napangga Berkelanjutan Oleh*. 7(1), 46–63. [https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7\(1\).6774](https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6774)
- Safi'i, M. F., & Satlita, L. (2016). Strategi Disparbud Kabupaten Magelang (Muhammad Fahrur Safi'i dan Lena Satlita, M.Si) 1. *Jurnal Pariwisata*, 5(10), 1–12. [https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/5169/4836%0Afile:///C:/Users/Asus/Downloads/5169-11252\\_1SM.pdf](https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/5169/4836%0Afile:///C:/Users/Asus/Downloads/5169-11252_1SM.pdf)
- Silviana, W., & Mubarak, A. (2020). Pengelolaan Pengembangan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan Pada Objek Wisata Pantai Carocok Painan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(3), 48–57. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.131>
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>.
- Wakila, H., H., R, Munajat, M., D., Z, & Kudus, I. (2022). Implementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Pantai Pangandaran Oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Pangandaran Saat Covid-19. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(1), 32-49.
- Yachya, A. N. (2016). Pengelolaan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis CBT (Community Based Tourism). *Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang*. 39(2), 107–116.
- Zhu, C., Hall, C., M, Ngan, H., F., B, and Peralta, R., L. (2023). How to use augmented reality to promote a destination? The mediating role of augmented reality attachment. *International Journal of Tourism Research*. 23 (5).



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license